

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2013 - 2018



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB 2013 – 2018 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 - 2018 dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB untuk masa 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan tercapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Bappeda Provinsi NTB.

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah bekerja sama sehingga renstra ini dapat disusun. Semoga pada masa mendatang, dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta dapat mengakomodir isu – isu strategis daerah.

Mataram, September 2014

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

CHAIRUL MAHSUL
NIP. 19591002 198503 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	7
2.2 Sumber Daya Bappeda	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana	21
2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	21
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	23
3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait Pelayanan pada Bappeda NTB	23
3.2 Hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya	24
3.3 Analisis Isu Strategis	27
3.3.1 Masalah dan Isu Strategis SKPD	27
3.3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	28
3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas	35
3.3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.4 Analisa Lingkungan Strategis	60
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	62
4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi NTB	62
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB	63

4.3	Strategi dan Kebijakan	68
BAB V RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK		
	SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	74
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN		
	RPJMD	82
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS dan CPNS di Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian	18
Tabel 2.2	Jumlah PNS dan CPNS di Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013 Berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 2.3	Data PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan Berdasarkan Esselon	19
Tabel 2.4	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	21
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 - 2013	25
Tabel 3.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2013	26
Tabel 3.3	Analisis Masalah dan Isu Strategis terkait Tupoksi Bappeda.....	27
Tabel 3.4	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB	29
Tabel 3.5	Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB	37
Tabel 3.6	Telaahan Pola Ruang Provinsi NTB	45
Tabel 3.7	Kawasan Strategis Provinsi Sesuai RTRW Provinsi NTB	55
Tabel 3.8	Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Bappeda Provinsi NTB	57
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	64
Tabel 4.2	Strategi dan Kebijakan	69
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	76
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	82
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Program Prioritas Bappeda Provinsi NTB.....	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat	20
------------	--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi memang tidak bisa dihindari adanya persaingan antar negara, karena pada prinsipnya globalisasi telah membuat dunia terintegrasi dalam satu kawasan perdagangan yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persaingan yang makin terbuka tersebut membutuhkan kemampuan adaptasi dan kemampuan daya saing dari masing – masing negara. Jika dilihat dari sisi potensi ekonomi, Indonesia merupakan salah satu *emerging country* yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi ASEAN. Dimana rata – rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,3 persen serta memiliki jumlah potensi tenaga kerja yang berada diatas negara ASEAN lainnya. Prospek Indonesia didukung oleh melimpahnya sumber daya alam, pertumbuhan konsumsi swasta dan iklim investasi yang semakin kondusif. Berdasarkan buku yang diterbitkan *The Economist* tahun 2012, Indonesia diramalkan akan menjadi salah satu negara maju dengan pendapatan sekitar US \$24.000 pada tahun 2020. Selain itu, *McKinsey Global Institute* juga memprediksi Indonesia akan masuk dalam 7 (tujuh) besar kekuatan ekonomi dunia pada 2030 mengalahkan Jerman dan Inggris.

Untuk mewujudkan hal diatas bukanlah hal yang mudah serta memiliki banyak tantangan. Salah satu yang akan segera dihadapi adalah diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015, sebuah konsep integrasi dimana ASEAN akan menjadi satu pasar besar sekaligus satu basis produksi. Konsep ini didesain untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar negara ASEAN. Dengan integrasi ekonomi dalam satu wadah, diharapkan negara – negara ASEAN akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi dan mampu menghadapi regionalisme lain di dunia seperti Uni Eropa, Masyarakat Ekonomi Amerika Latin dan sebagainya. Tuntutan transformasi pertumbuhan ekonomi yang saat ini bergantung pada sumber daya alam dan alokasi tenaga kerja murah (*resources and low cost-driven growth*) menjadi tuntutan untuk menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dengan memanfaatkan modal fisik dan sumber daya manusia terampil (*productivity-driven growth*), agar pertumbuhan ekonomi di negara ini tidak stagnan dan terhindar dari jebakan negara berpendapatan

menengah.

Untuk itu demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Indonesia yang merupakan negara kepulauan menerapkan sistem otonomi daerah sehingga terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kehidupan masyarakat berdasarkan prinsip – prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.

Pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

WEF telah mengelompokan 12 pilar daya saing sebagai pendorong produktivitas sebuah kawasan, yaitu : institusi, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan kesiapan teknologi, besaran pasar dan inovasi. Sehingga untuk meningkatkan daya saingnya, pemerintah daerah perlu memperhatikan dan mengimplementasikan aturan hukum secara tegas, pemerintahan yang bersih, keadilan dalam pemerataan perekonomian, stabilitas politik, keamanan dan ketertiban sosial, inovasi teknologi dan ketersediaan infratraktur yang memadai.

Saat ini penataan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai daerah otonom semakin menunjuk peningkatan kearah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah secara umum, serta penataan kewenangan, pemilihan kepala daerah, dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung terciptanya NTB sebagai daerah otonom yang berdaya saing, pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program strategis seperti peningkatan pelayanan masyarakat baik dibidang administrasi, penyediaan prasarana dan sarana,

pemberdayaan ekonomi, maupun pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan penguatan ketahanan pangan.

Namun berdasarkan hasil survey daya saing 33 provinsi di Indonesia yang dilakukan Lee Kuan Yew School of Public Policy – Universitas Nasional Singapura pada tahun 2012, Nusa Tenggara Barat berada di urutan 23 dan termasuk dari 19 provinsi yang daya saingnya berada dibawah tingkat rata – rata nasional. Survey tersebut menggunakan 91 indikator yang masuk dalam empat lingkup, yaitu : stabilitas ekonomi makro, perencanaan pemerintah dan institusi, kondisi keuangan-bisnis dan tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur.

Hal diatas merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimasa mendatang untuk meningkatkan posisinya yang saat ini berada di jajaran tengah agar bisa berada diatas rata – rata nasional. Antara lain dengan memajukan usaha yang berbasis kreativitas, mengembangkan potensi pariwisata serta meningkatkan iklim investasi. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional maupun daerah terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan pembangunan jangka menengah dan perencanaan pembangunan tahunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai lembaga teknis daerah yang mengemban tugas pada penataan ruang, perencanaan pembangunan, evaluasi dan pelaporan serta statistik, sangat mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) agar dapat mewujudkan aspirasi masyarakat. Untuk itu diperlukan penerapan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan nyata, sehingga perlu disusun suatu perencanaan yang sistematis pada kurun waktu lima tahun mendatang guna memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dalam sebuah Rencana Strategis guna mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Barat.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018 antara lain :

- a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- j. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 – 2029.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 adalah untuk merumuskan program - program perencanaan yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan faktor – faktor potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2013 - 2018.

Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arahan yang jelas dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan, sehingga dapat mewujudkan capaian indikator kinerja RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda, Susunan Kepegawaian dan Aset yang Dikelola, Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran.

BAB III : ISU – ISU BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan Bappeda, Hasil – hasil yang Dicapai Lima Tahun Sebelumnya, Analisis Isu Strategis terkait dengan Tugas dan Fungsi Bappeda, serta Analisis Lingkungan Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi Bappeda, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda, serta Strategi dan Kebijakan yang diambil.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada lingkup Bappeda.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB diatur dalam Perda Provinsi NTB Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Selain itu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Bappeda Provinsi NTB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rincian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi NTB dijabarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain :

1. Kepala Bappeda

Kepala Bappeda Provinsi NTB mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dibidang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan yang bersifat operasional;
- b. Pengarahan dan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana Bappeda Provinsi;
- c. Penetapan tata ruang Provinsi berdasarkan kesepakatan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang;
- e. Penetapan kebijakan teknis sebagai pedoman, pemberian bimbingan dan perizinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan, pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan personil, pembiayaan sarana dan prasarana Badan pada unit kerjanya;
- h. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan Bappeda.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pemeliharaan kantor. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat menjalankan fungsi:

- a. Pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi;
- b. Pengelolaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yang dipimpin oleh kepala subbagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Bappeda. Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Program dan Pelaporan

Tugas pokok Subbagian Program dan Pelaporan adalah menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis data, evaluasi program dan pelaporan.

Rincian tugas Subbagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan, program, dan pelaporan;
- Menghimpun dan menganalisa data dalam rangka program dan pelaporan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pelaporan;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Pelaporan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. Rincian tugas Subbagian Keuangan adalah:

- Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan kegiatan, bendaharawan dan atasan langsungnya;
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja baik rutin maupun pembangunan;
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyiapan tindak lanjut;
- Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan di lingkungan Bappeda. Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian yaitu :

- o Melaksanakan urusan ketatausahaan;
- o Melaksanakan urusan kepegawaian;
- o Melaksanakan urusan perlengkapan;
- o Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- o Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan, serta kelautan dan perikanan. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan, pertanian, industri dan perdagangan, koperasi, dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah – langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan dunia usaha, keuangan serta kelautan dan perikanan dalam

rangka pelaksanaan program pembangunan daerah yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program tahunan nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi :

a. Subbidang Pertanian dan Kelautan

Subbidang Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Pertanian dan Kelautan yaitu:

- o Menyusun rencana/program kerja pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan;
- o Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian, kelautan dan perikanan yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang pertanian dan kelautan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Industri dan Keuangan

Subbidang Industri dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha, serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Subbidang Industri dan Keuangan terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha;
- o Koordinasi perencanaan pembangunan industri, perdagangan, koperasi, dunia usaha yang disusun oleh SKPD yang berada dalam wilayah Provinsi;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang industri dan keuangan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata. Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kehutanan, serta kebudayaan dan pariwisata;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, yang disusun oleh SKPD satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;
- d. Koordinasi perencanaan tata ruang dan wilayah;
- e. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, pertambangan dan energi, perencanaan tata ruang wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam program nasional.

Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana membawahi 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang dan Prasarana. Rincian tugas masing-masing subbidang adalah sebagai berikut:

a. Subbidang Prasarana Wilayah

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah meliputi :

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi di bidang Prasarana Wilayah;

- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam

Sub Bidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang dan sumber daya alam serta tugas-tugas lain. Rincian tugas Subbidang Tata Ruang dan Sumberdaya Alam adalah sebagai berikut :

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Tata Ruang dan Sumber Daya Alam;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- b. Koordinasi perencanaan pembangunan dibidang sosial, pengawasan, perlindungan masyarakat, pendidikan dan olahraga, diklat, kesehatan dan kesejahteraan rakyat yang disusun oleh SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah, kabupaten/kota serta yang berada dalam wilayah Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan dan perumusan langkah-langkah pemecahan permasalahan;

- d. Koordinasi penyusunan program tahunan dibidang perencanaan pembangunan sosial yang meliputi bidang perlindungan masyarakat, sosial, kesehatan dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan olahraga, diklat;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pemerintahan

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan dibidang pemerintahan dan program ketertiban, pengawasan serta tugas – tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan yaitu:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang Pemerintahan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Subbidang Kesejahteraan Rakyat

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan dan olahraga, kesejahteraan sosial dan tugas - tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan, penyusunan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi dan statistik serta dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah. Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugas ini, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. Penyusunan rencana kerjasama pembangunan lintas Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak lainnya;
- c. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi pusat data pembangunan Provinsi guna menunjang pelaksanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pengembangan Perencanaan

Subbidang Pengembangan Perencanaan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan kegiatan tahun pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Perencanaan adalah sebagai berikut:

- o Menyusun rencana/program kerja;
- o Monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan perencanaan;
- o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka monitoring dan laporan pelaksanaan pembangunan

daerah serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan terdiri dari:

- Menyusun rencana/program kerja;
- Monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan perencanaan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaporan, pengumpulan data, evaluasi, penyusunan dan penyampaian informasi, pengelolaan pusat data pembangunan Provinsi serta dokumentasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda Provinsi NTB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja pembangunan lintas provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data menjadi informasi, pengelolaan pusat data pembangunan provinsi guna menunjang perencanaan pembangunan selanjutnya;
- d. Pengumpulan, penyusunan dokumentasi dan peragaan data statistik hasil pembangunan.

Bidang Statistik terdiri dari 2 (dua) subbidang yang dipimpin oleh kepala subbidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Statistik. Rincian tugas masing-masing subbidang meliputi:

a. Subbidang Pendataan

Subbidang Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik serta tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pendataan meliputi:

- Menyusun rencana/program kerja;
- Monitoring dan evaluasi dibidang Pendataan;
- Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;

- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Subbidang Pelayanan Informasi
- Subbidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data statistik menjadi bahan informasi, pengelolaan pusat data provinsi dengan memanfaatkan teknologi informatika guna mendukung perencanaan selanjutnya serta tugas-tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rincian tugas Sub Bidang Pelayanan Informasi terdiri dari:
- o Menyusun rencana/program kerja;
 - o Monitoring dan evaluasi dibidang Pelayanan Informasi;
 - o Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas;
 - o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Bappeda

Sumber daya yang dimiliki Bappeda Provinsi NTB terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat dan jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan perencanaan sehari – hari seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas perkantoran, meja, kursi dan peralatan kantor lainnya.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja pada lingkup Bappeda Provinsi NTB adalah sebanyak 112 orang PNS dengan komposisi pegawai laki – laki sebanyak 76 orang dan pegawai perempuan sebanyak 36 orang, sedangkan pegawai non PNS berjumlah 11 orang dengan komposisi 3 orang pegawai perempuan dan 8 orang pegawai laki - laki. Selain sebagai staf dan pejabat struktural terdapat juga beberapa pejabat fungsional, pejabat fungsional yang berada di lingkup Bappeda antara lain terdiri dari :

1. Pejabat Fungsional Perencana : 5 orang (Perencana Madya)
2. Pejabat Fungsional Arsiparis : 1 orang (Arsiparis Madya)

Pegawai Bappeda Provinsi NTB telah menempuh pendidikan formal dengan jenjang yang cukup variatif. Tingkat pendidikan yang mendominasi adalah lulusan Sarjana diikuti lulusan SMA kemudian lulusan Pasca Sarjana. Melalui program beasiswa, satu orang pegawai saat ini masih mengikuti pendidikan Doktoral di Selandia Baru dan satu orang lainnya mengikuti pendidikan Pasca Sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Sehingga dari segi kualitas Bappeda memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan dan mensinergikan program dan kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rincian pegawai Bappeda berdasarkan pendidikan formal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Jumlah PNS dan CPNS di Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013

Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

No	Pendidikan	Status Kepegawaian	
		PNS (Orang)	Non PNS (Orang)
1	SD	1	1
2	SMP	4	2
3	SMA	29	5
4	D3	2	-
5	S1/D.IV	54	3
6	S2	22	-
Jumlah		112	11

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. NTB

Adapun susunan pegawai di Bappeda Provinsi NTB berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah PNS dan CPNS di Bappeda Provinsi NTB Tahun 2013

Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian PNS (Orang)
1	Golongan I	4
2	Golongan II	28
3	Golongan III	65
4	Golongan IV	15
Jumlah		112

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. NTB

Beberapa pejabat eselon telah mengikuti pendidikan non formal sebagai syarat dalam mengemban jabatan, dengan rincian sebagai berikut :

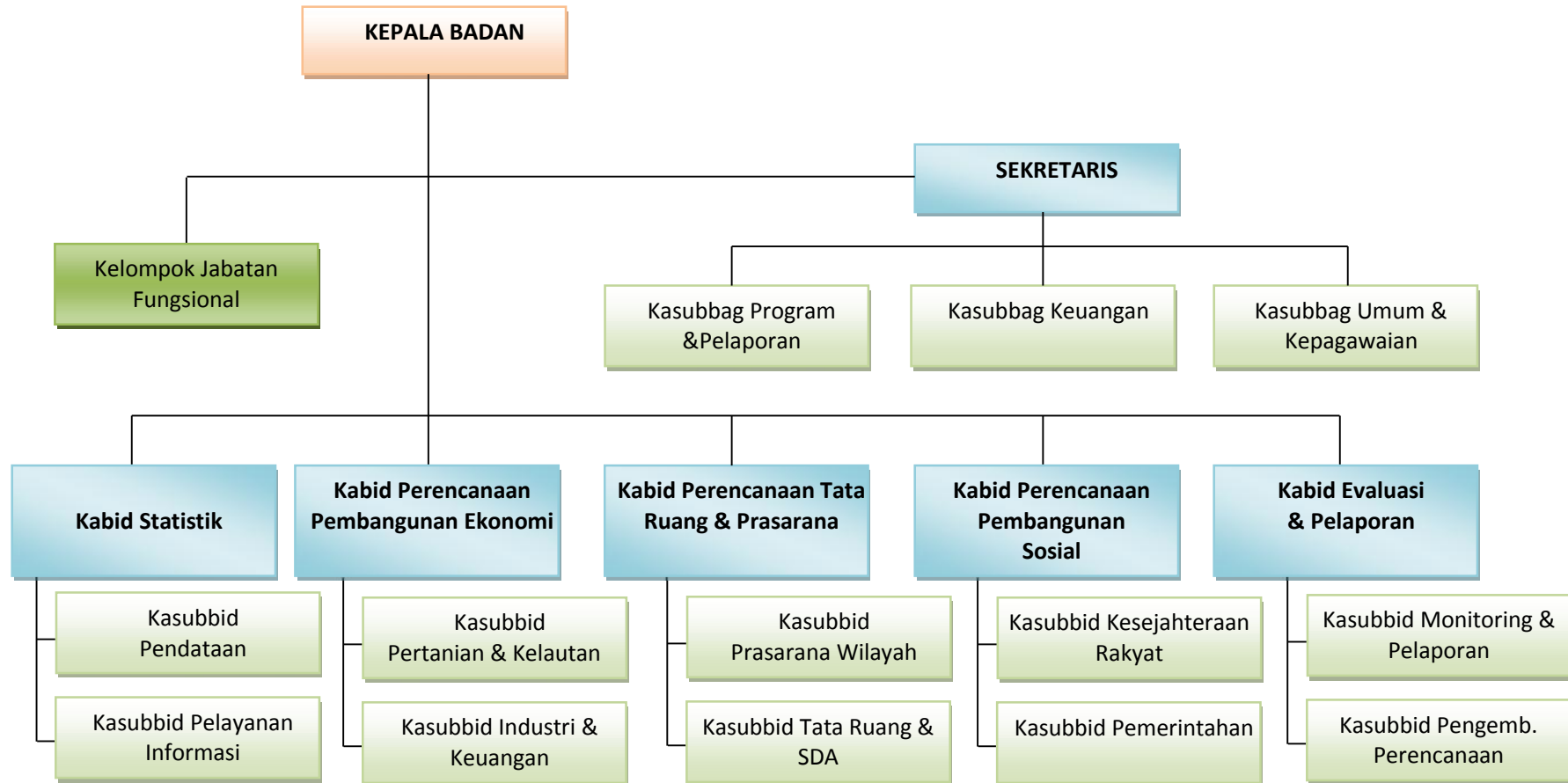
Tabel 2.3

Data PNS yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural dan Jabatan
Berdasarkan Esselon

No	Eselon	Tingkat Diklatpim	Jumlah Pejabat yang Mengikuti (Orang)
1	II a	Pim II	1
2	III a	Pim III	3
4	IV a	Pim IV	10
Jumlah			14

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. NTB

Gambar 2.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Prov. NTB

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pegawai Bappeda Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas sehari – harinya, disediakan beberapa sarana dan prasarana pendukung antara lain gedung kantor yang terdiri dari 2 (dua) lantai dengan luas 1.526 m² yang berdiri diatas lahan seluas 4.478,5 m² dengan sebuah mushola untuk beribadah dan 10 kamar mandi. Selain itu terdapat saluran telepon sebanyak 8 line, fasilitas komputer yang tersedia terdiri dari 60 unit computer PC dan 34 unit laptop, dilengkapi 62 unit printer serta didukung oleh jaringan internet dan bisa diakses pada tiap – tiap ruangan. Bappeda juga memiliki 3 (tiga) ruang rapat dengan kapasitas antara 20 sampai dengan 100 orang dilengkapi fasilitas audio visual dan infocus. Dan juga terdapat kendaraan dinas roda empat sebanyak 20 unit dan roda dua sebanyak 54 unit yang digunakan oleh pegawai Bappeda sebagai sarana transportasi dalam menjalankan tugas kantor. (Rincian asset pada lampiran)

2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi koordinasi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pendataan pada bidang ekonomi, social serta tata ruang dan prasarana wilayah dengan kelompok sasaran yaitu :

Tabel 2.4

Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

No	Bagian	Jenis Pelayanan	Kelompok Sasaran
1	Sekretariat	Administrasi, pelayanan surat menyurat, perencanaan internal	<ul style="list-style-type: none">• Pejabat dan Staff lingkup Bappeda Provinsi NTB
2	Statistik	Pusat pendataan dan penyebarluasan informasi pembangunan NTB	<ul style="list-style-type: none">• Gubernur dan Wakil Gubernur NTB• Badan dan Dinas Daerah Provinsi NTB• Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB• Seluruh Biro Lingkup Setda Provinsi NTB• Bappeda Kab/Kota se Provinsi NTB• Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BUMD• Masyarakat Umum
3	Evaluasi dan Pelaporan	Pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none">• Gubernur dan Wakil Gubernur NTB• Badan dan Dinas Daerah Provinsi

		perencanaan pembangunan NTB	<p>NTB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB • Seluruh Biro Lingkup Setda Provinsi NTB • Bappeda Kab/Kota se Provinsi NTB
4	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Perencanaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Badan dan Dinas Daerah Provinsi NTB lingkup bidang ekonomi • Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB lingkup bidang ekonomi • Seluruh Biro Setda Provinsi NTB lingkup bidang ekonomi • Bappeda Kab/Kota se Provinsi NTB • Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BUMD • Masyarakat Umum
5	Perencanaan Pembangunan Sosial	Perencanaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Badan dan Dinas Daerah Provinsi NTB lingkup bidang sosial • Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB lingkup bidang sosial • Seluruh Biro Setda Provinsi NTB lingkup bidang sosial • Bappeda Kab/Kota se Provinsi NTB • Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BUMD • Masyarakat Umum
6	Perencanaan Ruang Prasarana	Tata dan Perencanaan, pengawasan dan pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • Badan dan Dinas Daerah Provinsi NTB lingkup bidang tata ruang dan prasarana • Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB lingkup bidang tata ruang dan prasarana Seluruh Biro Setda Provinsi NTB lingkup bidang tata ruang dan prasarana • Bappeda Kab/Kota se Provinsi NTB • Lembaga Non Pemerintah/BUMN/BUMD • Masyarakat Umum

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Gambaran Umum Daerah Terkait Pelayanan pada Bappeda NTB

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur NTB dalam pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi NTB.

Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu ;

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah – masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Provinsi NTB dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan konsep penyelesaian masalah pembangunan memerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya Bappeda telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

3.2 Hasil yang dicapai Lima Tahun Sebelumnya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi NTB 5 (lima) tahun sebelumnya, telah ditentukan beberapa indikator sebagai dasar penilaian keberhasilan pencapaian tujuan. Salah satu indikator utama yang berhasil dicapai adalah telah dikeluarkan 11 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang terdiri dari 1 Perda RTRW Provinsi dan 10 Perda RTRW Kabupaten/Kota. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ADHB tanpa sector pertambangan menunjukkan kenaikan yang signifikan dari Rp. 5.738.751,- di tahun 2009 menjadi Rp. 9.023.518,- di tahun 2012.

Selain itu, pada tahun 2013 Bappeda Provinsi NTB berhasil meraih Anugerah Pangripta Nusantara yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berprestasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan kriteria :(1) Konsistensi perencanaan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah;(2) Konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan;(3) Inovasi proses perencanaan serta kebijakan/program pembangunan. Provinsi NTB berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik III Kategori B yaitu bagi daerah yang memiliki kriteria sumberdaya yang belum optimal, tetapi memiliki kemampuan potensial untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas. Capaian Bappeda sepanjang tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2009 – 2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	-	4-5	-	-	-	-	-	5	-	-	5.75	5.75	5.75	-	-	-	-	1.28
2	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB (tanpa sektor pertambangan)	-	10,828,674	-	6,685,103	7,102,922	8,168,361	9,393,615	10,828,674	5,738,751	7,204,164	8,102,638	9,023,518	-	0.86	1.01	0.99	0.96	-
3	Peraturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	-	11 Perda	-	-	-	-	-	11	2	2	9	11	11	-	-	-	-	1.00

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2009 – 2013

Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,742,074,570	1,808,862,550	1,999,257,590	3,565,098,000	3,328,608,700	1,662,159,696	1,729,911,629	1,957,739,353	3,453,700,803	3,078,757,076	0.95	0.96	0.98	0.97	0.92	21.51%	23.41%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	565,327,500	907,077,300	421,465,000	810,700,000	1,174,184,800	546,763,350	814,152,250	336,013,825	644,550,809	1,008,560,209	0.97	0.90	0.80	0.80	0.86	36.03%	20.50%
Program Peningkatan disiplin aparatur	49,720,000	113,995,000	-	69,015,000	-	45,463,750	113,624,000	-	67,710,000	-	0.91	1.00	-	0.98	-	-17.68%	-12.52%
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25,357,500	183,226,910	30,975,000	187,496,000	126,370,900	232,317,020	157,841,350	27,035,100	161,508,200	115,678,500	9.16	0.86	0.87	0.86	0.92	253.05%	95.62%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	261,503,300	1,659,545,100	1,485,028,000	45,500,000	19,200,000	259,903,500	1,610,064,900	1,441,923,000	45,494,900	12,657,250	0.99	0.97	0.97	1.00	0.66	92.34%	103.05%
Program Pengembangan Data dan Informasi	308,250,000	418,650,000	104,389,000	1,613,000,000	340,776,000	267,919,000	393,768,800	103,801,700	1,490,205,550	309,016,020	0.87	0.94	0.99	0.92	0.91	331.76%	327.24%
Program Kerjasama Pembangunan	538,620,000	557,737,725	171,250,000	403,378,250	359,650,000	517,596,100	522,488,300	167,028,850	399,226,350	355,181,000	0.96	0.94	0.98	0.99	0.99	14.74%	17.98%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	88,244,000	67,545,600	154,430,000	491,792,000	-	78,311,450	62,075,600	149,378,000	464,942,500	-	0.89	0.92	0.97	0.95	-	55.91%	82.79%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,899,784,009	2,167,079,285	1,218,678,060	2,367,762,100	3,669,702,750	1,778,676,750	2,042,505,450	1,170,478,900	2,232,633,550	3,380,136,100	0.94	0.94	0.96	0.94	0.92	29.90%	15.72%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1,747,493,700	1,496,065,700	687,716,776	1,330,404,650	694,167,750	1,649,892,069	1,331,372,230	668,152,700	1,251,169,725	681,353,750	0.94	0.89	0.97	0.94	0.98	-5.70%	4.53%
Program Perencanaan Sosial Budaya	1,056,696,000	1,003,320,040	852,816,904	1,084,910,000	591,547,400	899,625,475	912,324,936	845,153,818	1,018,438,000	515,767,200	0.85	0.91	0.99	0.94	0.87	-9.58%	3.64%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1,219,837,800	1,285,523,800	772,275,000	1,825,944,000	1,629,678,200	1,137,798,750	1,115,437,050	743,456,700	1,543,609,400	1,534,572,150	0.93	0.87	0.96	0.85	0.94	22.79%	18.08%

Sumber : DPA dan Laporan Tahunan 2009 – 2013 Bappeda Prov. NTB

3.3 Analisis Isu Strategis

3.3.1 Masalah dan Isu Strategis SKPD

Tabel 3.3

Analisis Masalah dan Isu Strategis terkait Tupoksi Bappeda

BIDANG	MASALAH	ISU STRATEGIS
SEKRETARIAT	Kualitas pelayanan kesekretariatan belum optimal;	Kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur belum optimal;
	Kuantitas dan kualitas sarana prasarana kantor terbatas;	
	Kemampuan SDM perencana masih terbatas;	
	Daya serap anggaran belum sesuai target;	
	Perencanaan program/kegiatan belum optimal;	
	Kualitas laporan rencana dan kinerja program/kegiatan belum optimal;	
STATISTIK	Pengelolaan basis data belum terpadu;	Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat;
	Penyebarluasan data dan informasi pembangunan masih terbatas;	
	Ketidak selarasan data dan informasi pembangunan daerah;	
EVAPOL	Hasil monitoring dan evaluasi belum optimal dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan;	Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan;
	Koordinasi perencanaan pembangunan belum optimal;	
	Konsistensi rencana program/kegiatan dengan penganggaran program/kegiatan pembangunan belum terlaksana secara optimal;	Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah;

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL	Rencana pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur belum terpadu/berbasis tata ruang.	Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat;
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI		Sinergi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan;
BIDANG PERENCANAAN TATA RUANG DAN PRASARANA WILAYAH		Rencana pembangunan berbasis tata ruang.

3.3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur

Demi melaksanakan program kegiatan untuk 5 (lima) tahun mendatang, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah menetapkan visi dan misi agar pembangunan lebih terarah. Visi dan misi tersebut dirangkai dan merupakan hasil rumusan dari identifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pengalaman pelaksanaan pembangunan Gubernur 5 (lima) tahun sebelumnya.

Hasil identifikasi visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan Bappeda. Dengan demikian, melihat program kegiatan hasil penjabaran visi dan misi tersebut Bappeda dapat meninjau kesenjangan program dan kegiatan yang direncanakan, agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB.

Adapun visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2013 – 2018 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”

Makna visi diatas adalah :

- Masyarakat NTB : seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat
- Beriman : taat beragama, berbudi pekerti luhur dan toleran
- Berbudaya : sadar budaya dan memelihara nilai – nilai kearifan lokal
- Berdayasaing : birokrasi bersih dan melayani serta masyarakat sehat, cerdas produktif, inovatif, kreatif

- Sejahtera : terpenuhinya kebutuhan dasar (ekonomi, sosial dan keadilan)

Dari visi diatas, kemudian dijabarkan dalam tujuh misi dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4

Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
1	Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter melalui pemantapan ketaatan beragama, peningkatan budi pekerti, dan pengembangan toleransi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akhlak dan moral berlandaskan nilai – nilai agama 2. Mengembangkan semangat kebersamaan dalam kemajemukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya masyarakat yang agamis dan bermartabat 2. Terwujudnya masyarakat yang santun dan berbudaya 3. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan muatan lokal budi pekerti, budaya dan nilai – nilai toleransi di sekolah dan madrasah 2. Pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah dan sumbangan sosial lainnya untuk pengentasan kemiskinan 3. Melanjutkan pembangunan Islamic center dan sarana prasarana keagamaan lainnya 4. Pemberdayaan dan pengembangan potensi tokoh agama dan tokoh masyarakat 5. Mengembangkan lembaga – lembaga keagamaan dan kemasyarakatan serta penyediaan insentif
2	Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk	Meningkatkan peran budaya dan kearifan lokal sebagai	Terwujudnya pembangunan berbasis budaya dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan pusat – pusat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
	pembangunan	penggerak pembangunan	kearifan lokal	kebudayaan 2. Reaktualisasi dan pewarisan nilai – nilai budaya dan kearifan lokal 3. Pengembangan tradisi/budaya tertulis 4. Pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan kaderisasi seniman/budayawan 5. Pemberdayaan tokoh dan lembaga adat untuk resolusi konflik 6. Pengembangan kegiatan berkesenian dan berkebudayaan
3	Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan	6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik 7. Meningkatkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum 8. Meningkatkan stabilitas kamtibmas	1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani 2. Terwujudnya masyarakat sadar hukum 3. Terwujudnya rasa aman masyarakat	1. Penciptaan birokrasi yang bersih dan melayani 2. Peningkatan profesionalisme aparatur dan kesejahteraan pegawai 3. Penciptaan rasa aman masyarakat 4. Inovasi manajemen penyelenggaraan pemerintahan
4	Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, keluarga	1. Meningkatkan kualitas pendidikan 2. Meningkatkan derajat kesehatan 3. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1. Terwujudnya masyarakat cerdas kreatif dan inovatif 2. Terwujudnya masyarakat sehat dan sejahtera 3. Terkendalinya pertumbuhan	1. Pemantapan wajar 9 tahun menuju pendidikan menengah universal 12 tahun 2. Pengembangan pendidikan berkarakter

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
	berencana dan kesejahteraan sosial yang berkualitas, terjangkau dan berkeadilan gender	<ul style="list-style-type: none"> 4. Memfasilitasi penanganan anak terlantar dan anak jalanan 5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 	<p>penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Tertanganinya anak terlantar dan anak jalanan 5. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan PAUDNI 4. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan 5. Melanjutkan program beasiswa 6. Pengembangan rumah pintar desa/kelurahan 7. Mengembangkan taman bacaan masyarakat 8. Melanjutkan Jamkesmasda, Jampersal 9. Peningkatan akses masyarakat ke sanitasi dasar dan air bersih 10. Penanggulangan narkoba, HIV/AIDS dan penyakit menular 11. Melanjutkan revitalisasi Posyandu dan Keluarga Berencana 12. Pemberdayaan penyandang cacat, anak terlantar 13. Pengembangan parenting bagi anak terlantar 14. Pemberdayaan perempuan pedesaan dan pesisir 15. Peningkatan kapasitas dan perlindungan TKI/TKW 16. Peningkatan kerjasama

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
				ketenagakerjaan antar provinsi dan antar negara 17. Peningkatan program kepemudaan dan olah raga prestasi
5	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, mempercepat penurunan kemiskinan dan mengembangkan keunggulan daerah melalui industri pariwisata, agroindustri, dan ekonomi kreatif berbasis budaya sumberdaya lokal dan iptek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan ketahanan pangan 2. Mengembangkan agroindustri 3. Mengembangkan ekonomi kreatif 4. Mengembangkan kepariwisataan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya ketahanan pangan 2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat 3. Menurunnya angka kemiskinan 4. Meningkatnya kesempatan kerja 5. Berkembangnya kepariwisataan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan sentra agrobisnis dan agroindustri 2. Peningkatan kapasitas wirausaha baru, usaha kecil dan menengah 3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis satu desa satu produk unggulan 4. Peningkatan kualitas dan pengembangan destinasi wisata 5. Pemberdayaan kelompok sadar wisata 6. Pengembangan geopark Rinjani dan Tambora 7. Pengembangan hortipark berbasis holtikultura varitas unggulan lokal 8. Fasilitas pengembangan pasar desa 9. Pengembangan industri kerajinan rumah tangga pendukung pariwisata 10. Melanjutkan pengembangan koperasi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
				berkualitas 11. Pengembangan jaringan penelitian dan sistem inovasi daerah (SIDa)
6	Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur serta konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemantapan jalan 2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi, air bersih dan sanitasi 3. Meningkatkan konektivitas antar wilayah dan telekomunikasi 4. Meningkatkan ketersediaan energi dan kelistrikan 5. Meningkatkan kualitas permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya aksesibilitas inter dan antar wilayah 2. Meningkatnya ketersediaan air irigasi, kualitas air bersih dan sanitasi 3. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan telekomunikasi 4. Meningkatnya ketersediaan energi dan kelistrikan 5. Meningkatnya kualitas permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pemantapan infratraktur dan sistem jaringan infrastruktur strategis (jalan, moda transportasi, sistem irigasi, pelabuhan, bandara, terminal, kelistrikan, telekomunikasi dan informatika) 2. Meningkatkan ketersediaan energi listrik untuk mendukung kegiatan ekonomi 3. Pengembangan kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis cepat tumbuh 4. Melanjutkan peningkatan sarana dan prasarana pendukung aktivitas sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan
7	Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan luas lahan pertanian berkelanjutan 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber mata air 3. Mempertahankan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya luas lahan pertanian berkelanjutan 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber mata air 3. Dipertahankannya luas kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melanjutkan pengembangan geopark rinjani dan tambora 2. Fasilitasi pembangunan kebun raya 3. Pemberdayaan kelompok

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
		<p>luas kawasan hutan dan menurunkan luas lahan kritis</p> <p>4. Meningkatkan luas ruang terbuka hijau</p> <p>5. Melindungi dan melestarikan ekosistem pesisir dan kelautan</p> <p>6. Mengembangkan energi baru dan terbarukan</p>	<p>hutan dan berkurangnya luas lahan kritis</p> <p>4. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau</p> <p>5. Terlindunginya dan terlestarikannya ekosistem pesisir dan kelautan</p> <p>6. Berkembangnya energi baru dan terbarukan</p>	<p>perlindungan mata air</p> <p>4. Penguatan lembaga kesatuan pengelolaan hutan (KPH)</p> <p>5. Implementasi model konservasi keanekaragaman hayati daerah</p> <p>6. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis</p> <p>7. Memantapkan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>8. Pengembangan sistem pengelolaan limbah</p> <p>9. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan – kawasan konservasi laut dan hutan</p> <p>10. Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana alam dan perubahan iklim</p> <p>11. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup</p> <p>12. Perlindungan dan konservasi mata air dan sumberdaya alam</p> <p>13. Pengelolaan dan rehabilitasi</p>

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
1	2	3	4	5
				ekosistem pesisir dan laut (mangrove, terumbu karang, padang lamun)

Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2013 -2018 maka tugas dan fungsi serta kedudukan Bappeda selaku unsur pendukung Kepala Daerah dibidang perencanaan pembangunan berkaitan dengan misi 4, 5, 6 dan 7 pada tabel diatas yaitu melakukan koordinasi bidang ekonomi, social dan infrastruktur serta tata ruang wilayah, memantau dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah dari berbagai sektor untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Sinkronisasi kegiatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mutlak dilaksanakan, agar perencanaan pembangunan mikro maupun makro berjalan sinergis dan berkesinambungan. Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas tahun 2010 – 2014, arah kebijakan dan strategis nasional dipengaruhi oleh arus besar globalisasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu – isu yang berdimensi lintas bidang, seperti demokratisasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), ketegangan lintas – batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Karena itu, arah kebijakan yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional adalah **“Mewujudkan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas Baik Jangka Menengah maupun Tahunan”**. Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan juga lebih baik atau lebih berkualitas, dalam arti : lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

Arah kebijakan Kementerian PPN/Bappenas tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Bappeda Provinsi NTB untuk masa 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan yang telah dirumuskan Bappeda Provinsi NTB antara lain :

1. Sinkronisasi strategi dokumen perencanaan/kegiatan dan implementasi program serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan/program bidang ekonomi, sosial, tata ruang dan prasarana.
2. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur antar wilayah dan antar sektoral.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Reformasi birokrasi dengan tata kelola pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3.3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari segi struktur ruang maupun pola ruang.

Yang dimaksud dengan "struktur ruang" adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah provinsi. Sedangkan yang dimaksud dengan "pola ruang" adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

- Rencana Struktur Ruang

Untuk struktur ruang dipisahkan menjadi rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan. Dengan telaah terhadap struktur ruang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5

Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTB

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana sistem perkotaan	PKN berada di Mataram	Memiliki standar infrastruktur minimal - Perhubungan : bandara pusat penyebaran primer, pelabuhan nasional/utama tersier atau Terminal Penumpang Tipe A - Ekonomi : pasar induk antar wilayah, perbankan nasional atau internasional - Kesehatan : rumah sakit umum tipe A - Pendidikan : perguruan tinggi S1	Kota Mataram
		PKW berada di Praya, Sumbawa Besar dan Raba	Memiliki standar infrastruktur minimal - Perhubungan : bandara pusat penyebaran tersier, pelabuhan regional/pengumpan primer atau Terminal Penumpang Tipe B - Ekonomi : pasar induk regional, perbankan regional atau nasional - Kesehatan : rumah sakit umum tipe B - Pendidikan : perguruan tinggi D-3	Kota Praya, Sumbawa Besar dan Raba
		PKWp berada di Gerung, Tanjung, Selong, Taliwang, Dompu dan Woha PKL berada di Lembar, Narmada, Kopang, Sengkol, Mujur, Bayan, Pemenang, Masbagik, Keruak, Labuhan Lombok, Poto Tano, Jereweh, Alas, empang, Lunyuk, Lengguan, Labangka, Calabai, Kempo, Hu'u, Kilo, Kore, O'o, Sila,	Memiliki standar infrastruktur minimal - Perhubungan : bandara perintis, pelabuhan lokal/pengumpan sekunder atau Terminal Penumpang Tipe C - Ekonomi : pasar induk lokal, perbankan lokal atau regional - Kesehatan : rumah sakit umum tipe C - Pendidikan : sekolah menengah	

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tangga, Wawo, Wera dan Sape		
2	Rencana sistem jaringan	Sistem jaringan transportasi	<p>Sistem jaringan transportasi nasional</p> <p>Terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan nasional terdiri dari jalan arteri primer dan jalan kolektor primer - Jaringan prasarana terdiri dari Terminal Penumpang Kelas A - Pelabuhan pengumpul - Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi - Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) - Bandar udara pusat pengumpul skala sekunder - Bandar udara pusat pengumpul tersier <p>Sistem jaringan transportasi nasional</p> <p>Terdiri dari sistem transportasi darat, laut dan udara, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan provinsi 	<p>Mataram, Gerung, Sumbawa Besar dan Raba</p> <p>Lembar, Labuhan Lombok dan Bima</p> <p>Lembar, Bima dan Sape</p> <p>Teluk Awang</p> <p>Selaparang/Praya</p> <p>Muhammad Salahuddin Bima</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan prasarana LLAJ meliputi Terminal Tipe B 	<p>Jalan lintas utama Pulau Lombok, jalan lintas utama Pulau Sumbawa, jalan lintas utara dan selatan Pulau Lombok, jalan lintas utara dan selatan Pulau Sumbawa Tanjung, Praya, Selong, Taliwang, Dompu dan Woha</p>
			<ul style="list-style-type: none"> - Pelabuhan pengumpan - Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota - Pelabuhan khusus penumpang - Bandar udara pusat 	<p>Bangsals Pemenang, Labuhan Haji, Tanjung Luar, Benete, Badas, Calabai, Kempo, Waworada, Cempi dan Sape</p> <p>Labuhan Lombok, Telong - elong, Pototano, Benete, Pulau Moyo, Lua Air</p> <p>Pesisir pantai Kota Mataram</p> <p>Brang Biji dan</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pengumpulan	Sekongkang
		Sistem jaringan energi dan kelistrikan	<p>Pembangkit tenaga listrik</p> <p>- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)</p>	<p>Ampenan (Kota Mataram), Taman (Kota Mataram), Paok Motong (Kab. Lombok Timur), Gili Trawangan (Kab. Lombok Utara), Gili Air (Kab. Lombok Utara), Gili Meno (Kab. Lombok Utara), Maringkik (Kab. Lombok Timur), Taliwang (Kab. Sumbawa Barat), Klawis (Kab. Sumbawa Barat), Sekongkang (Kab. Sumbawa Barat), Labuhan I (Kab. Sumbawa), Alas I (Kab. Sumbawa), Sebotok (Kab. Sumbawa), Labuhan Haji (Kab. Lombok Timur), Lebin (Kab. Sumbawa), Bugis Medang (Kab. Sumbawa), Lunyuk (Kab. Sumbawa), Empang (Kab. Sumbawa), Lantung (Kab. Sumbawa), Mamak (Kab. Sumbawa), Dompus (Kab. Dompus), Kempo (Kab. Dompus), Kwangko (Kab. Dompus), Pekat (Kab. Dompus), Raba (Kota Bima), Ni'u (Kota Bima), Bajo Pulau (Kab. Bima), Nggelu (Kab. Bima), Pa'i (Kab. Bima), Sa'i (Kab. Bima), Sampungu (Kab. Bima), Sape (Kab. Bima), Monta (Kab. Bima), Kore (Kab. Bima)</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) - Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) - Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut (PLTGL) - Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) - Pembangkit Listrik Tenaga Bio Energi (PLTBE) 	<p>Jeranjang (Kabupaten Lombok Barat), IPP Tahap I (Kab. Lombok Timur), IPP Tahap II (Kab. Lombok Barat), Loan (Kab. Lombok Timur), IPP Alas (Kab. Sumbawa), APLN (Kab. Bima), Bonto (Kota Bima)</p> <p>Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, dan Bima Kokoq Putih (Kabupaten Lombok Utara), Muntur (Kabupaten Lombok Utara), Pekatan (Kabupaten Lombok Utara), Brangbeh (Kabupaten Sumbawa), Batulanteh (Kabupaten Sumbawa)</p> <p>Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima</p> <p>Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima</p> <p>Semalun (Kabupaten Lombok Timur), Hu'u (Kabupaten Dompu), Maronge (Kabupaten Sumbawa)</p> <p>Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Bima</p> <p>Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima Seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Nusa Tenggara Barat</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Jaringan tenaga listrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan transmisi tegangan tinggi - Jaringan distribusi - Gardu Induk <p>Distribusi minyak dan gas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depo bahan bakar minyak 	<p>SUTT Ampenan – Jeranjang, SUTT Jeranjang – Sengkol, SUTT Sengkol–Selong, SUTT PLTU IPP–Selong, SUTT Ampenan – Tanjung, SUTT Selong – Pringgabaya, SUTT PLTP – Sembalun, SUTT PLTU Bonto – Ni’u, SUTT Dompou – Labuhan, SUTT PLTU Badas – Labuhan, SUTT Labuhan – Tano, SUTT PLTP Hu’u – Dompou, SUTT Brangbeh – Labuhan, SUTT Maronge – Labuhan.</p> <p>Seluruh wilayah Provinsi NTB</p> <p>GI. Tanjung (Kab. Lombok Utara); GI. Ampenan (Kota Mataram); GI Jeranjang (Kab. Lombok Barat); GI Sengkol (Kab. Lombok Tengah); GI Selong (Kab. Lombok Timur); GI Pringgabaya (Kab. Lombok Timur); GI Kuta (Kab. Lombok Tengah); GI Tanjung (Kab. Lombok Utara); GI Bima (Kab. Bima); GI Dompou (Kab. Dompou); GI Woha (Kab. Bima)</p> <p>Ampenan, Kayangan, Tanjung, Bayan, Labuhan Haji, Keruak, Pringgabaya, Taliwang, Sekongkang, Badas, Alas Barat, Kempo, Pekat, Rasa Na’e, Wera dan Sape.</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> - Depo gas - Pengembangan penglohan migas (kilang) - Wilayah penunjang migas 	<p>Ampenan, Labuapi, Narmada, Praya, Puyung, Penujak, Selong, Labuhan Haji, Pringgabaya, Masbagik, Seteluk, Sekongkang, Jereweh, Badas, Unter Iwes, Moyo, Lopok, Kempo, Manggelewa, Woja, Woha, Panda, Sape, dan Wera</p> <p>Sekotong, Bayan, Kayangan, Keruak, Pujut, Taliwang, Seteluk, Moyo Utara, Kempo, Pekat, Sanggar, Wera, dan Langgudu</p> <p>Bayan, Kayangan, Gangga, Tanjung, Sambelia, Alas Barat, Badas, Moyo Utara, Maronge, Plampang, Empang, Kempo, Pekat, Tambora, Donggo, Sanggar, Tolowali, Wera, Sape, dan Langgudu</p>
		Sistem jaringan telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan mikro digital perkotaan - Jaringan serat optik dalam provinsi - Jaringan terestrial dalam provinsi 	<p>Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, kota Bima</p> <p>Kota Mataram (Mataram), Kab. Sumbawa (sumbawa Besar), Kab. Sumbawa Barat (Taliwang & Maluk), Kab. Dompu (Dompu), Kab/Kota Bima (Bima & Rasanae)</p> <p>Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, kota Bima</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan stasiun telepon otomatis Pengembangan jaringan telekomunikasi khusus - Jaringan ultimedia terpusat di Kota Mataram - Pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan - Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana - Penanganan telekomunikasi khusus untuk instansi pemerintah, swasta & masyarakat lainnya 	<p>Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima, kota Bima</p> <p>Distribusi Tanjung – Gerung – Praya – Selong – Taliwang – Sumbawa Besar – Dompu – Woha – Kota Bima</p>
		Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air	<p>Sistem jaringan prasarana sumberdaya air nasional terkait dengan wilayah Provinsi NTB</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Sungai (WS) strategis nasional yaitu WS Pulau Lombok - Sistem jaringan irigasi nasional - Daerah Irigasi (DI) nasional <ul style="list-style-type: none"> (a) DI nasional lintas Kab/Kota (b) DI nasional utuh Kab/Kota 	<p>DAS Dodokan, DAS Menanga, DAS Putih, dan DAS Jelateng</p> <p>Bendungan Batujai, Bendungan Pengga, bendungan Mamak, Bendungan Btu Bulan, Bendungan Tiu Kulit, Bendungan Gapit, Bendungan Pelapparado, bendungan Suni, Bendungan Plara</p> <p>Batu Bulan, Mamak, Pelaparado</p> <p>Jurang Sate Hulu, Jurang Sate Hilir, Muiur II, Batu Jai, Surabaya, Jurang Batu, Pengga</p>

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wilayah Sungai (WS) lintas Kab/Kota (WS Sumbawa dan WS Bima - Dompu) - Sistem jaringan irigasi provinsi meliputi bendungan, bendung, jaringan saluran irigasi dan daerah irigasi - Sistem jaringan air bersih provinsi meliputi jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku dan instalasi air minum 	<p>WS Sumbawa (DAS Moyo Hulu, DAS Rhee, DAS Jereweh, DAS Beh, DAS Bako, DAS Ampang, dan DAS Moyo); WS Bima - Dompu (DAS Baka, DAS Hoddo, DAS Banggo, DAS Parado, DAS Rimba dan DAS Sari)</p> <p>Danau Segara Anak, Waduk Batujai, Waduk Pengga dan Rencana pembangunan waduk baru (Mujur dan Pandanduri); Waduk Mamak, Lebok Taliwang, Waduk Tiu Kulit, Waduk Batu Bulan, Waduk Gapit, Waduk Pelaparado, Waduk Sumi dan Rencana pembangunan waduk baru (Rababaka, Beringin Sila, Labangka dan Bintang Bano)</p> <p>Sumber air baku di Pulau Lombok berada pada lereng Gunung Rinjani, di Pulau Sumbawa sumber air baku sebagian besar dari air tanah dalam dan sungai/bendung</p>
		Sistem Jaringan Prasarana Persampahan	Tepat Pembuangan Akhir Kebon Kongok dengan sistem sanitary landfill	Kab. Lombok Barat
		Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi	<p>Sistem perpipaan air limbah provinsi Mataram Metro</p> <p>Instalasi pengolahan air limbah di Mataram Metro</p>	<p>Kota Mataram dan sebagian wilayah Kab. Lombok Barat</p> <p>Kota Mataram dan sebagian wilayah Kab. Lombok Barat</p>

- Rencana Pola Ruang

Sedangkan pada rencana pola ruang wilayah provinsi, meliputi rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN yang terkait dengan wilayah provinsi dan rencana

pola ruang provinsi. Adapun telaahan untuk rencana pola ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Telaahan Pola Ruang Provinsi NTB

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rencana Pengembangan Kawasan Lindung	Kawasan lindung nasional dan provinsi	<p>Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hutan lindung - Kawasan resapan air <p>Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya nasional</p> <p>Kawasan lindung nasional lainnya</p> <p>Kawasan perlindungan setempat</p>	<p>Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab.Sumbawa Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima</p> <p>Kawasan Gunung Rinjani, Kawasan Selatan Pulau Lombok; dan Kawasan Gunung Tambora</p> <p>Cagar Alam (CA.), Suaka Margasatwa (SM.), Taman Nasional (TN.) Gunung Rinjani, Taman Hutan Raya (Tahura) Nuraksa dan Taman Wisata Alam (TWA)</p> <p>Taman Buru (TB) Pulau Moyo dan Taman Buru (TB) Tambora Selatan</p> <p>Kawasan sempadan pantai sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 meter dari garis pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai; Kawasan sempadan sungai antara 30-100 meter sesuai letak, bentuk dan kondisi sungai pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) :</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>Jelateng, Dodokan, Putih, Menanga, Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, Pulau Moyo, Ampang, Hoddo, Bango, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh; Kawasan sekitar danau atau waduk Segara Anak, Batujai, Mujur, Pandanduri Swangi, Pengga, Beringin Sila, Labangka, Mamak, Lebok Taliwang, Bintang Bano, Tiu Kulit, Batu Bulan, Pelara, Gapit, Pelaparado, Campa, Rababaka, Sumi antara 50-100 meter dari garis pasang tertinggi ke arah darat; Kawasan Hutan Kota yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p>
		Kawasan rawan bencana alam	<p>Kawasan rawan bencana gunung berapi</p> <p>Kawasan rawan banjir</p>	<p>Sekitar Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Api Sangiang</p> <p>Kota Mataram (Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok); Kab Lobar dan KLU (Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung, dan Jembatan Kembar); Kab. Loteng (sepanjang aliran sungai); Kab Lotim</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kawasan rawan tsunami	<p>(sepanjang aliran sungai); Kab Sumbawa dan KSB (Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok); Kab Dompu (sepanjang aliran sungai); Kota Bima (sepanjang pantai di Kota Raba); Kab. Bima (sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke – Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya)</p> <p>Kab Lobar (kawasan pesisir bagian selatan); Kab Loteng (Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang); Kab Lotim (Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji); KSB (Maluk, Benete, Tongo, Sejong, dan Sekongkang); Kab Sumbawa (Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang); Kab Dompu (Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan); Kota Bima (pantai bagian barat); Kab. Bima (Sape, Lambu, Karumbu)</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Kawasan rawan angin topan</p> <p>Kawasan rawan gelombang pasang</p>	<p>Kab Lobar dan KLU (Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Narmada dsk, dan Bayan dsk); Kab Lotim (Kecamatan Keruak dsk, Jerowaru dsk, dan Sambelia dsk); KSB (Kecamatan Brang Rea dsk); Kab Sumbawa (Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk); Kab Dompui (Hampir seluruh wilayah); Kab Bima (Kecamatan Woha dsk, Monta dsk, Woja dsk, dan Wera dsk)</p> <p>Kota Mataram (Sekip dan Ampenan); Kab Lobar dan KLU (sepanjang pesisir Kab Lobar dan KLU); Kab. Loteng (Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang); Kab Lotim (Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok); KSB (Maluk, Benete, Tongo, Sejong, dan Sekongkang); Kab Sumbawa (Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian Selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang); Kab Dompui (Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan); Kota Bima (pantai bagian barat Kota Bima); Kab Bima (Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya)</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Kawasan rawan kekeringan</p> <p>Kawasan rawan tanah longsor</p>	<p>Kab Lobar dan KLU (Kecamatan Lembar; Sekotong dan sekitarnya; Kedondong; Malimbu; Pemenang dan sekitarnya; Tanjung; Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan; dan Medas); Kab Loteng (Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya); Kab Lotim (Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur; Labuhan Haji; Pringgabaya; Kecamatan Sambelia dan sekitarnya); KSB (Sejorong, Maluku, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh); Kab Sumbawa (Lunyuk Besar-Kopo-Batulanteh-Baturotok-Punik; Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat; Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-Kalaning-Tanjungberu-Pungkit; Plampang-Empang); Kab Dompu (Kempo, Hu'u, Kilo; dan Mbawi); Kab/Kota Bima (Sila; Paradowane; Bima dan sekitarnya; Tawali; Sape; dan P. Sangiang)</p> <p>Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu, Sekotong, Kuta, Gunung Nangi, Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluku, Punik, Alas, Semongkat, Lenangguar, Empang, Tambora, Ranggo, Paradowane, Bima, Karumbu dan Gunung Kuta</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kawasan rawan abrasi pantai	Tersebar di wilayah pesisir di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa
			Kawasan rawan gempa bumi	Tersebar di beberapa wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa
2	Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya	Kawasan budidaya nasional Kawasan budidaya provinsi	Kawasan Andalan - Kawasan Andalan Lombok - Kawasan Andalan Sumbawa - Kawasan Andalan Bima Kawasan Andalan Laut adalah Kawasan Andalan Perairan Selat Lombok Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dan terbatas	- - - Gunung Rinjani (RTK 1), Pandan Mas (RTK 2), Gunung Sasak (RTK 3), Pelangan (RTK 7), Marejebonga (RTK 13), Pelaning (RTK 5), Ngali (RTK 12), Serading (RTK 36), Pusuk Pao (RTK 38), Riwo (RTK 43), Rentuk Sebokas (RTK 46), Buin Soway (RTK 57), Selalu Legini (RTK 59), Pucak Ngengas (RTK 60), Batulanteh (RTK 61), Kerawak Utuk (RTK 62), Dodo Jaran Pusang (RTK 64), Ampang Kampaja (RTK 70), Olat Lake (RTK 78), Gili Ngara (RTK 79), Pulau Rai Rakit Kwangko (RT 80), Santong Labu Baron (RTK 81), Samoko Lito (RTK 89), Pajo (RTK 42), Tambora (RTK 53), Soromandi (RTK 55), Toffo Rompu (RTK 65), Pulau Satonda (RTK 83), Tolowata (RTK 23), Tololai (RTK 24), Kota Donggomasa (RTK 67), Nipa Pusu (RTK 66), Nanganae Kapenta (RTK 68), Pulau Sangeang (RTK 86), Gili Banta dsk (RTK 87) dan Lemusung dsk (RTK 91)

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>Kawasan pertanian lahan basah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan pertanian lahan kering - Kawasan pertanian hortikultura <p>Kawasan peruntukan perkebunan</p> <p>Kawasan peruntukan peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulau Lombok - Pulau Sumbawa 	<p>Tersebar di seluruh wilayah provinsi dengan luas lahan bervariasi</p> <p>Tersebar di seluruh SWP seluas ±600.795 Ha</p> <p>Tersebar di seluruh wilayah provinsi</p> <p>Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIM-Bun): Sekotong, Gerung, Gangga, Bayan, Kopang, Pujut, Terara, Pringgabaya, Utan Rhee, Batulanteh, Sorinomo, Tambora, Sumbawa, Kayangan, dan Wera dan kawasan pengembangan tanaman komoditi unggulan</p> <p>Kawasan pengembangan sapi di Pulau Lombok tersebar di seluruh kabupaten se Pulau Lombok</p> <p>Kab. Sumbawa Barat (Kec. Seteluk Taliwang, Brang Rea, Jereweh, Sekongkang); Kab.Sumbawa (Kec. Rhee, Lape Lopok, Moyo Hilir, Moyo Hulu, Utan, Empang, Tarano, Plampang, Labangka, Maronge, Ropang, Batu Lanteh); Kab Dompu (Kec Pajo, Hu'u, Mangalewa, Kempo, Kilo, Pekat); Kab Bima (Ambalawi, Belo, Donggo, Langgudu, Sanggar, Tambora, Wawo, Wera, Woha)</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Kawasan peruntukan pertambangan</p> <p>Kawasan peruntukan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulau Lombok - Pulau Sumbawa <p>Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau-pulau kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pulau Lombok 	<p>WUP operasi produksi di Pulau Sumbawa seluas ±100.536,29 hektar dan zona tertentu yang telah dinyatakan layak berdasarkan hasil kajian teknis, ekonomi dan lingkungan</p> <p>Senggigi dan sekitarnya, Suranadi dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Benang Stokel dan sekitarnya, Dusun Sade dan sekitarnya; Selong Belanak dan sekitarnya, Kuta dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya; Gili Indah dan sekitarnya, Gunung Rinjani dan sekitarnya</p> <p>Maluk dan sekitarnya; Pulau Moyo dan sekitarnya; Hu'u dan sekitarnya, Teluk Bima dan sekitarnya, Sape dan sekitarnya; Gunung Tambora dan sekitarnya</p> <p>Gili Indah dan sekitarnya, Senggigi dan sekitarnya, Lembar dan sekitarnya, Gili Gede dan sekitarnya, Teluk Sepi dan sekitarnya, Kuta, Awang dan sekitarnya, Tanjung Luar dan sekitarnya, Gili Sulat dan sekitarnya, dan Labuhan Lombok dan sekitarnya</p>

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Pulau Sumbawa	Alas - Pantai Utara Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya ; Teluk Saleh dan sekitarnya; dan Labuhan Lalar, Maluk dan sekitarnya; Teluk Sanggar dan sekitarnya; Teluk Cempi dan sekitarnya; Waworada dan sekitarnya; Teluk Bima dan sekitarnya; dan Sape dan sekitarnya
			Kawasan peruntukan industri	
			- Kawasan Agroindustri	Gerung, Kediri, Labuapi, Sekotong, Bayan, Kayangan, Gangga, Batukliang, Praya Barat, Praya Timur, Jonggat, Batukliang Utara, Praya Barat, Praya Timur, Pringgarata, Pujut, Selong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya, Labuhan Haji, Jerowaru, Jereweh, Taliwang, Seteluk, Brang Rea, Alas, Utan, Rhee, Sumbawa, Moyohulu, Moyohilir, Lape Lopok, Plampang, Empang, Dompou, Kempo, Bolo, Woha, Belo, Wawo, Sape, dan RasanaE
			- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Labuapi, Kediri, Gerung, Tanjung, Pemenang, Praya, Batukliang, Kopang, Masbagik, Aikmel, Labuhan Haji, Jereweh, Alas, Sumbawa, Empang, Plampang, Dompou, Kempo, Hu'u, Bolo, Woha Sape, dan Pajo.dan RasanaE

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kawasan peruntukan permukiman - Kawasan permukiman perkotaan - Kawasan permukiman perdesaan Kawasan peruntukan lainnya	Berada di kawasan perkotaan Ibukota Provinsi, Ibu Kota Kabupaten dan Kota, Ibu Kota Kecamatan dan Desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan Berada diluar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan lahan sawah dan perkebunan Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

- Kawasan Strategis Provinsi

Sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi NTB, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain dibidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan strategis sebagaimana dimaksud diatas meliputi kawasan strategis dari kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Provinsi hanya meliputi kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang prioritas penataan ruangnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7

Kawasan Strategis Provinsi
Sesuai RTRW Provinsi NTB

No	Kawasan Strategis	Indikasi Sektor Unggulan pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kawasan strategis dari kepentingan pertumbuhan ekonomi	<p>Sektor unggulan perdagangan – jasa, industri dan pariwisata</p> <p>Sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan</p> <p>Sektor unggulan pertanian, industri, dan pariwisata</p> <p>Sektor unggulan pariwisata, industri dan perikanan</p> <p>Sektor unggulan pertanian dan industri</p> <p>Sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata</p> <p>Sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata</p> <p>Sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri</p> <p>Sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri</p> <p>Sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, dan perikanan</p> <p>Sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri</p> <p>Sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri</p>	<p>Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapi dan Kecamatan Kediri</p> <p>Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno, dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara</p> <p>Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur</p> <p>Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur</p> <p>Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat</p> <p>Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa</p> <p>Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa</p> <p>Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu</p> <p>Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu</p> <p>Hu’u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu</p> <p>Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima</p> <p>Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima</p>

No	Kawasan Strategis	Indikasi Sektor Unggulan pada Periode Perencanaan Berkenaan	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kawasan strategis dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini	Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa
		Kawasan Ekosistem Gunung Tambora	Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima
		Kawasan Ekosistem Hutan Parado	Kabupaten Dompu dan Bima
		Kawasan Ekosistem Pulau Sangiang	Kabupaten Bima

- Kajian Strategis Lingkungan Hidup

Selain aspek ekonomi dan sosial pilar utama pembangunan yang tidak kalah penting adalah aspek lingkungan. Keberhasilan pembangunan selain dicirikan oleh peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan, juga mesti ada jaminan keberlanjutan. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan diharuskan mengandung kepentingan pelestarian lingkungan hidup. Perhatian terhadap pelestarian lingkungan hidup idealnya sudah muncul dan ditempatkan sejak proses awal perumusan strategi hingga pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi dari tuntutan ini adalah hadirnya instrument pengkajian terhadap lingkungan hidup pada tataran strategis setara dengan strategi pembangunan itu sendiri.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau yang dikenal juga dengan nama Strategic Environmental Assessment (SEA) merupakan penyempurnaan dari AMDAL sebagai instrument lingkungan hidup yang sudah ada sebelumnya. Apabila AMDAL digunakan pada kegiatan proyek maka KLHS ada pada tingkatan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan. Adapun untuk daerah NTB isu lingkungan, ekonomi dan sosial budaya yang menjadi perhatian saat ini antara lain : alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, konservasi dan pengelolaan sumberdaya air, sistem drainase yang tidak berjalan, permukiman kumuh dan sanitasi buruk, kerusakan SDA, abrasi pantai dan rab, infrastruktur wilayah dan perekonomian yang kurang memadai, kebutuhan energi, ketahanan pangan, kemiskinan, konflik sosial dan rendahnya kualitas SDM. Adapun aspek kajian serta ringkasan dokumen KLHS Pemerintah Provinsi NTB adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS
Provinsi NTB

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	<p>Pemda Provinsi NTB mencanangkan gerakan percepatan pembangunan infrastruktur berupa proyek kemantapan jalan provinsi sepanjang 322 kilometer baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, dengan dukungan anggaran sebesar Rp 499,8 miliar.</p> <p>Selain pembangunan infrastruktur dibidang transportasi, pemerintah daerah juga meningkatkan infrastruktur kesehatan. Pembangunan infrastruktur dibidang kesehatan merupakan prioritas. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah Puskesmas, Poskesdes dan tenaga kesehatan dalam mendukung pencapaian program unggulan dalam bidang kesehatan. Begitu juga pembangunan infrastruktur bidang pendidikan, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan.</p>	Bappeda pada masa yang akan datang harus selektif dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan per tahun agar dapat menciptakan pemerataan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas.
2	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	<p>Untuk pencemaran lingkungan hidup dikhawatirkan rendahnya kesadaran/perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya penegakan hukum dan kurangnya fasilitas pendukung dalam pengelolaan sampah terutama di kawasan pasar, permukiman, bantaran sungai. Hal ini berdampak pada perubahan sanitasi lingkungan, gangguan kesehatan dan nilai estetika.</p>	Bappeda perlu turut serta dalam melakukan pemantauan secara terus menerus sehingga sumber pencemaran dapat diketahui dengan cepat selain itu perlu direncanakan pengembangan zona industri yang dilengkapi sarana pengolahan limbah dan penguatan kelembagaan insdustri.
3	Kinerja layanan/jasa ekosistem	<p>Meminimalkan terjadinya alih fungsi lahan - lahan produktif dengan mengendalikan pemanfaatan dan pengaturan lahan</p>	Bappeda berkoordinasi dengan SKPD pada lingkup Pemprov NTB untuk menjaga ekosistem sesuai dengan RTRW

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Dalam pemanfaatan sumber daya alam, Pemerintah Provinsi NTB akan meningkatkan program perlindungan dan konservasi terhadap daerah tangkapan air termasuk sumber - sumber mata air serta memantau dan mencegah terjadinya pencemaran mata air dan sungai yang ada di daerah hulu sampai dengan hilir, pemerintah juga akan melakukan pencegahan perubahan fungsi pemanfaatan kawasan resapan air menjadi kawasan budidaya.	Untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya alam Bappeda berfungsi sebagai koordinator dalam perumusan kegiatan bersama - sama dengan BLHP, Distamben, PU dan dinas - dinas lainnya yang berkepentingan.
5	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Berkurangnya hutan mangrove, perubahan iklim global, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kaidah lingkungan, eksploitasi karang laut menyebabkan abrasi dan banjir rob di kawasan pesisir. Sehingga berdampak terhadap rusaknya ekosistem pantai, berkurangnya obyek wisata, berkurangnya jumlah kunjungan wisatawan.	Bappeda telah melakukan koordinasi dalam rangka mitigasi terhadap perubahan iklim melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang telah ditetapkan oleh Gubernur
6	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Pertumbuhan penduduk yang tinggi, kemiskinan, lemahnya pengawasan, illegal logging, penambangan liar, perambahan hutan, alih fungsi lahan, perburuan liar akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan berkurangnya keanekaragaman hayati.	Untuk mengantisipasi hal ini, Bappeda melakukan koordinasi kepada pemangku kebijakan serta para stakeholder sehinggaantisipasi terhadap ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dapat dapat ditingkatkan dan dijaga.

- Keterkaitan Perencanaan Bappeda Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, maka hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mampu mengejawantahkan jaminan bentuk relasi yang adil dan saling menguntungkan. Hubungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyangkut 4 bidang utama, yaitu : 1) Hubungan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, 2) Hubungan Keuangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, 3) Hubungan Pelayanan umum, 4) Hubungan Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan

Sumberdaya lainnya.

Dalam UU tersebut telah diatur bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib yang sama dengan wilayah kewenangan yang berbeda, salah satunya adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan serta perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang. Bappeda Provinsi NTB melakukan fungsi koordinasi, pembinaan dan supervisi kepada Bappeda Kabupaten/Kota dalam menyusun program kebijakan yang bersifat strategis serta dalam membuat rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perencanaan sebelum disahkan oleh kepala daerah agar tidak terjadi overlapping dalam pelaksanaan kewenangan daerah, sehingga produk yang dihasilkan selaras dan sinergis dengan program pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, karena pemerintah provinsi merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran, Pemerintah Provinsi (dalam hal ini Bappeda) senantiasa berupaya untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan seperti RPJP, RTRW, RPJMD dan RKPD, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang. Dokumen perencanaan dimaksud, yang disusun oleh Kabupaten/Kota akan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Provinsi.

Pada simpul – simpul dokumen perencanaan ini, Pemerintah Provinsi (Bappeda bersama SKPD terkait lainnya) akan selalu berupaya untuk menyelaraskan, mensinergikan, mengsinkronisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sehingga antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat saling mendukung dalam upaya menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bappeda Provinsi dapat mengarahkan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi berdasarkan produk dan program unggulan masing – masing melalui koordinasi dan peningkatan networking antar daerah yang kesemuanya bermuara untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda Provinsi NTB dapat menjadi inisiator dalam membangun kesadaran bersama mengenai mutual relationship yang adil dan

saling menguntungkan antar pemerintahan lokal dan/atau dengan pihak swasta.

3.4 Analisa Lingkungan Strategis

Tahap awal proses penetapan strategi adalah menaksir kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dimiliki organisasi melalui analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threats). Analisa SWOT memungkinkan organisasi memformulasikan dan mengimplementasikan strategi utama sebagai tahap lanjut pelaksanaan dan tujuan organisasi, dalam analisa SWOT informasi dikumpulkan dan dianalisis. Hasil analisis dapat menyebabkan dilakukannya suatu perubahan pada misi, tujuan, sasaran, strategi atau kebijakan yang sedang berjalan.

Dalam penyusunan suatu rencana yang baik, perlu diketahui daya dan dana yang dimiliki serta mengetahui segala unsur kekuatan maupun kelemahan yang ada. Data yang terkumpul mengenai faktor – faktor internal tersebut merupakan potensi di dalam melaksanakan usaha yang direncanakan. Dilain pihak perlu diperhatikan faktor-faktor eksternal yang akan dihadapi yaitu peluang-peluang atau kesempatan yang ada atau yang diperhatikan akan timbul dan ancaman atau hambatan yang diperkirakan akan muncul dan mempengaruhi usaha yang dilakukan.

Adapun analisa Strength, Weakness, Opportunity dan Threats Bappeda Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

S trength Kekuatan		W eakness Kelemahan	
1	Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup memadai;	1	Kompetensi SDM belum optimal;
2	Sarana prasarana kantor tersedia;	2	Rendahnya kualitas sarana dan prasarana;
3	Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara otonomi;	3	Sinergitas rencana sektoral dan wilayah masih rendah;
4	Produk perencanaan yang dihasilkan telah tersedia dan ditetapkan;	4	Belum dimanfaatkannya secara optimal hasil – hasil monitoring, evaluasi dan penelitian dalam perencanaan pembangunan;
5	Adanya dukungan pimpinan terhadap seluruh unit organisasi dan lancarnya pola komunikasi antar atasan dan bawahan.	5	Inisiatif, inovasi dan kreatifitas staff perlu ditingkatkan.

O pportunity P eluang	T hreats T antangan
1 Peran Bappeda sebagai Perencana Pembangunan semakin strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah;	1 Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan bahan kebijakan perencanaan dan publikasi hasil penelitian belum sepenuhnya ditindaklanjuti;
2 Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk – produk perencanaan;	2 Belum optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
3 Adanya tuntutan penerapan <i>good governance</i> serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan sehingga mendukung penyusunan perencanaan yang lebih partisipatif;	3 Sistem pengendalian dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan input bagi kebutuhan perencanaan;
4 Ketersediaan teknologi informasi sehingga memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan seluruh <i>stakeholder</i> baik melalui jaringan internet, telepon dan faximile;	4 Belum adanya regenerasi tenaga Fungsional Perencana, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di Bappeda Provinsi NTB;
5 Kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia semakin terbuka lebar;	5 Pemanfaatan teknologi informasi dalam system perencanaan pembangunan;
6 Semakin banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK serta lembaga donor luar dan dalam negeri yang dapat diajak bekerjasama untuk pengembangan perencanaan pembangunan daerah.	6 Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum bersinergi dengan optimal.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi NTB

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 12 disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Sebuah visi memiliki peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu organisasi/daerah di masa yang akan datang.

Bappeda Provinsi NTB sebagai SKPD yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, harus dapat memberikan peranan sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka visi Bappeda Provinsi NTB harus diarahkan pada upaya berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat luas.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka proses perencanaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu Bappeda telah merumuskan visi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL”

Penjabaran dari Visi Bappeda Provinsi NTB diatas adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga adalah wadah dimana orang berkumpul, bekerja sama secara berencana terorganisasi, terkendali, dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Perencana adalah penyusun atau pembuat rencana baik konsep maupun uraiannya.
- c. Andal memiliki arti yang dapat dipercaya.

Agar dapat mewujudkan Visi diatas, maka rumusan Misi Bappeda Provinsi NTB harus selaras dengan visi dan memiliki relevansi dengan pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi NTB periode 2013 - 2018 . Untuk itu, Bappeda Provinsi NTB menetapkan misi 2013 - 2018 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur.
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel untuk perencanaan pembangunan.
3. Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.
5. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.
6. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi NTB

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut, Bappeda Provinsi NTB menetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan derivasi dari masing – masing tujuan. Sebagai pernyataan dari misi dan tujuan menjadi hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan dari misi Bappeda Provinsi NTB antara lain :

Misi 1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur

- T.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kantor.
- T.2 Meningkatkan akuntabilitas keuangan.
- T.3 Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan.

Misi 2 Menyediakan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel

- T.1 Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah.
- T.2 Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah.

Misi 3 Mendayagunakan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dalam perencanaan pembangunan

- T.1 Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ.

T.2 Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Misi 4 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

T.1 Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.

T.2 Meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan sasaran MDGs

Misi 5 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan sosial dasar daerah.

T.1 Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

T.2 Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat.

Misi 6 Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis berbasis tata ruang

T.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang.

T.5 Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam.

Sedangkan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ada. Adapun rincian dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu lima tahun mendatang, sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
Misi 1 Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalitas Aparatur								
Meningkatkan kualitas pelayanan kantor	Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik	Rata – rata waktu tindak lanjut surat menyurat	Jam	17	17	17	17	17
	Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	Persentase layanan sarana prasarana kantor	%	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
	Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai	Peralatan kantor yang terpelihara	%	100	100	100	100	100
	Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur	Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	%	60%	70%	80%	90%	100
Meningkatkan akuntabilitas keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab	Persentase penyerapan anggaran	%	92	92.5	93	93.5	94
Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan	Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	Persentase partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan daerah	%	40	40	40	40	40
	Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	Penyelesaian dokumen/laporan : - DPA SKPD - LAKIP	Bulan	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1
Misi 2 Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel								
Mendayagunakan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Terkelolanya basis data spasial daerah	Presentase penanganan data spasial daerah	%	20	40	60	80	100
	Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	Orang	10.000	20.000	40.000	80.000	160.000

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
Meningkatkan akurasi dan kemutakhiran data pembangunan daerah	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Presentase data pembangunan daerah yang selaras	%	26	37	63	74	100
Misi 3 Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan								
Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	Dokumen	1	1	1	1	1
		Ketepatan penyelesaian dokumen /laporan : - KUA/PPAS murni - KUA/PPAS perubahan - LKPJ	Bulan	4 4 3	4 4 3	4 4 3	4 4 3	4 4 3
Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	%	90	90	90	90	90
Misi 4 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah.								
Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.	Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan	Persentase komoditi unggulan daerah yang dikembangkan	%	16	32	51	70	91
	Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	Persentase rencana program industri kreatif yang dikembangkan	%	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
Meningkatkan perekonomian daerah dengan mewujudkan sasaran MDGs	Tercapainya tujuan dan sasaran MDGs di Provinsi NTB	Dokumen hasil kegiatan pendukung MDGs yang berprestasi ditingkat nasional	Dokumen	1	1	1	1	1
Misi 5 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah.								
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Terwujudnya rencana pemerintahan yang bersih dan melayani	Persentase rencana program pemerintahan yang bersih dan melayani	%	47,5	52,2	58,43	65,9	72,49
Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat	Tersedianya pelayanan sosial dasar yang berkualitas	Persentase rencana program pelayanan sosial dasar strategis daerah	%	58	69	79	88	99
Misi 6 Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang								
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang	Terwujudnya konektivitas infrastruktur antar wilayah	Persentase rencana program infrastruktur strategis daerah	%	68,92	72,67	72,9	73,21	83,65
Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam	Terwujudnya sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	Persentase rencana tata ruang Kab/Kota yang diselaraskan dengan rencana tata ruang provinsi : - RTDR	%	12	24	36	48	50
	Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan adaptasi mitigasi bencana	Persentase rencana program rehabilitasi hutan dan lahan, RTH dan pengelolaan bencana	%	14,09	28,18	42,26	56,35	70,44

4.3 Strategi dan Kebijakan

Faktor – faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal ataupun eksternal dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi, dan menolong para perencana apa yang bisa dicapai serta apa yang perlu diperhatikan. Untuk 5 (lima) tahun kedepan strategi dan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang akan diperhatikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan

ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Kuantitas dan kualitas pelayanan aparatur belum optimal	<i>MENJADI LEMBAGA PERENCANA YANG ANDAL</i>	Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan kantor	Terwujudnya pengelolaan naskah yang baik	Fasilitasi, koordinasi dan regulasi	Mengembangkan prosedur dan tata kelola naskah dinas yang efektif dan efisien
				Terwujudnya layanan sarana prasarana kantor	Fasilitasi, koordinasi dan regulasi	Meningkatkan layanan kebersihan, keamanan dan penggunaan sarana prasarana kantor
				Tersedianya kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai	Koordinasi dan rehabilitasi	Menambah ketersediaan dan memperbaharui sarana prasarana kantor
				Tersedianya aparat yang mumpuni dan berbudi pekerti luhur	Fasilitasi dan edukasi	Meningkatkan kemampuan aparat melalui pendidikan/bintek fungsional, teknis dan rohani

ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Kualitas data dan informasi pembangunan belum akurat			Meningkatkan akuntabilitas keuangan	Terwujudnya layanan keuangan yang cepat, transparan dan laporan keuangan yang bertanggungjawab	Koordinasi, edukasi dan fasilitasi	Percepatan realisasi keuangan dan perbaikan laporan kinerja keuangan
			Meningkatkan kualitas rencana dan pelaporan	Terwujudnya pola perencanaan yang partisipatif dan akurat	Koordinasi dan fasilitasi	Menyelenggarakan proses dan tahapan perencanaan yang sistematis dan partisipatif
			Tersedianya dokumen renstra, renja SKPD dan LAKIP yang berkualitas	Koordinasi, fasilitasi dan edukasi	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dan penyajian rencana program/kegiatan	
Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan		Menyediakan Data dan Informasi yang Akurat, Mutakhir dan Akuntabel	Mendayaguna kan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan daerah	Terkelolanya basis data spasial daerah	Fasilitasi, koordinasi dan edukasi	Perencanaan berbasis data spasial untuk pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur daerah
				Tersebar nya data dan informasi pembangunan berbasis web	Fasilitasi, mobilisasi, dan koordinasi	Pengembangan NTB satu data

ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan akurasi dan kemitakhiran data pembangunan daerah	Tersedianya data yang akurat, selaras, mutakhir dan akuntabel	Koordinasi, fasilitasi dan edukasi	Pembentukan forum data
Kualitas dokumen rencana pembangunan daerah dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah		Mendayagunakan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Dalam Perencanaan Pembangunan	Meningkatkan kualitas dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA/PPAS dan LKPJ	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang berdaya guna, dan laporan pertanggungjawaban yang berkualitas	Koordinasi, edukasi dan fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan pelaksanaan program pembangunan daerah - Substansi LKPJ
Dayaguna hasil guna monitoring dan evaluasi pembangunan untuk perencanaan			Meningkatkan kemanfaatan laporan hasil monitoring dan evaluasi program pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Koordinasi, edukasi/sikronisasi	Model integrasi hasil monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan

ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Sinergi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan		Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Ekonomi Daerah	Mengembangkan perekonomian dengan berbasis agrikultur dan pariwisata.	Terwujudnya rencana pemanfaatan SDA potensial daerah secara berkelanjutan	Koordinasi, fasilitasi, edukasi dan sinkronisasi	Pengembangan potensi perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian dan hasil hutan non kayu
				Terwujudnya rencana pengembangan industri berbasis agro dan pariwisata (industri kreatif)	Koordinasi, fasilitasi, edukasi dan sinkronisasi	Pengembangan industri IKM, pemberdayaan UMKM, peningkatan ekspor serta stabilitas perdagangan dalam negeri dan pengelolaan keuangan daerah
				Tercapainya tujuan dan sasaran MDGs di Provinsi NTB	Koordinasi, fasilitasi, edukasi dan sinkronisasi	Perkuatan koordinasi antar instansi, masyarakat dan LSM lingkup perekonomian
		Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Sosial Dasar Daerah	Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Terwujudnya rencana pemerintahan yang bersih dan melayani	Koordinasi, fasilitasi, edukasi dan evaluasi	Perkuatan sistem pemerintahan, pelayanan public e-gov, peningkatan akuntabilitas

ISU	VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
			Meningkatkan kuantitas kesejahteraan masyarakat	Tersedianya pelayanan sosial dasar yang berkualitas	Koordinasi, fasilitasi dan regulasi	Menyediakan rumah sakit, alat kesehatan, pendidikan menengah & kejuruan, balai latihan kerja dan fasilitas penyandang cacat
Rencana pembangunan berbasis tata ruang		Meningkatkan Kualitas Rencana Pembangunan Daerah yang Sinergis Berbasis Tata Ruang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur daerah berbasis tata ruang	Terwujudnya konektivitas infrastruktur antar wilayah	Koordinasi, regulasi, fasilitasi dan rehabilitasi	Mempercepat pembangunan fasilitas transportasi udara, laut, darat, listrik, energi baru terbarukan, air bersih bagi rakyat miskin
			Memantapkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan bencana alam	Terwujudnya sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	Koordinasi, fasilitasi dan regulasi	Mengembangkan HKM, konservasi hutan dan lahan
				Tersedianya rencana pengelolaan SDA dan adaptasi mitigasi bencana	Koordinasi dan fasilitasi	Penyusunan Perda KSP, pengendalian penataan ruang, pengendalian dampak bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk dapat mengimplementasikan visi, misi melalui strategi dan kebijakan, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD 2013 - 2018 serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka program yang akan dilaksanakan meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Program pengembangan data/informasi;
6. Program kerjasama pembangunan;
7. Program perencanaan pembangunan daerah;
8. Program perencanaan pembangunan ekonomi;
9. Program perencanaan sosial dan budaya;
10. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
11. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;
12. Program perencanaan pengembangan kota – kota menengah dan besar.

Dan sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Bappeda setiap tahunnya membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan realisasi anggaran dengan memuat keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing – masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Pada umumnya evaluasi kegiatan dan program serta kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja antara lain :

- a. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi dan informasi;

- b. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik;
- c. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Prov. NTB untuk periode tahun 2013 - 2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda Prov. NTB yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda pada 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bappeda
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Masyarakat yang mengakses layanan NTB Online (RKPD)	4653 org	10.000 org	20.000 org	40.000 org	80.000 org	160.000 org	160.000 org

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Online, NTB Satu Data)							
2	Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Program Prioritas Bappeda Provinsi NTB

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelayanan administrasi yang terselenggara	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah surat yang terlayani	Surat	300	300	150	125	100	100	100
Persentase penyediaan jasa perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase jasa administrasi keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase jasa kebersihan kantor yang disediakan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah paket alat tulis kantor	pkt	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah paket blangko	pkt	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah gedung yang disediakan instalasi listrik	gedung	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah paket peralatan perlengkapan kantor	pkt	1	1	1	1	1	1	5
Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman kantor	bln	12	12	12	12	12	12	12

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah rapat dan konsultasi keluar daerah yang dihadiri	kali	75	75	75	75	75	75	75
Persentase penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	kali	68	68	68	68	68	68	68
Pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Kegiatan	5	5	5	5	5	5	5
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	unit	81	2	1	1	1	1	86
Jumlah bangunan gedung/kantor yang terpelihara	unit	1	1	1	1	1	1	1
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	81	81	83	84	85	86	86
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	218	218	218	218	218	218	218
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	%	100	100	100	100	100	100	100
Kapasitas sumber daya aparatur yang ditingkatkan	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3
Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	2	10	10	11	12	13	56
Paket peraturan perundangan yang disosialisasikan	pkt	1	1	1	1	1	1	1

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah aparatur yang dibina mental dan fisik	orang	112	112	112	112	112	112	112
Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1
Dokumen keuangan akhir tahun yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Data informasi yang disusun	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2
Buletin info Bappeda yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3
Dokumen profile daerah	Dokumen	1	1	1	2	4	4	4
Dokumen kerjasama	Dokumen	3	11	5	11	5	11	11
Dokumen kerjasama dengan dunia usaha/lembaga yang disusun	Dokumen	3	11	5	11	5	11	11
Perencanaan yang dilaksanakan	Kegiatan	11	8	8	8	8	8	8
Dokumen pengembangan partisipasi masyarakat yang tersedia	Dokumen	3	1	1	1	1	1	5
Dokumen RKPD murni dan perubahan yang disusun	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2
Kegiatan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	5
Dokumen laporan kinerja pemerintah daerah yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Dokumen LKPJ yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokumen hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
Dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan yang disusun	Dokumen	4	4	4	4	4	4	4
Dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	11	2	2	2	2	2	2
Sosialisasi dan publikasi yang dilaksanakan	Kali	22	20	21	22	23	24	24
Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD Provinsi NTB	%	100	100	0	0	100	100	100
Sistem perencanaan pembangunan daerah yang dikembangkan	Buku	-	1000	100	150	150	150	1,550
Dokumen perencanaan	Dokumen	6	8	8	8	8	8	8
Dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat yang disusun	Dokumen	3	4	4	4	4	4	4
Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun	Dokumen	3	4	4	4	4	4	4
Dokumen perencanaan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10
Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang tersedia	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan sosial bidang Kesra yang diselenggarakan	Kegiatan	3	2	2	3	3	3	13
Dokumen perencanaan	Dokumen	4	1	4	3	4	5	17
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun	Dokumen	1	1	2	2	2	2	9
Dokumen hasil koordinasi perencanaan tata ruang dan SDA	Dokumen	3	1	2	1	2	3	9
Kegiatan koordinasi pembinaan dan pengendalian WISMP II yang diselenggarakan	Kegiatan	4	3	4	4	4	4	19
Dokumen perencanaan	Dokumen	0	3	3	2	3	4	4
Laporan hasil sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Dokumen /Laporan	0	1	1	-	1	2	5
Dokumen kerjasama dlm penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disepakati	Dokumen	0	1	1	1	1	1	4
Dokumen rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	4

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dokumen perencanaan	Dokumen	0	2	2	2	2	3	3
Jumlah dokumen permasalahan transportasi	Dokumen	0	1	1	-	1	-	3
Jumlah dokumen penanggulangan bencana alam/sosial	Dokumen	0	-	-	-	-	1	1
Jumlah dokumen penanganan pusat - pusat pertumbuhan ekonomi	Dokumen	0	-	1	-	-	-	1
Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat - pusat industri	Dokumen	0	-	-	1	-	-	1
Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat - pusat pendidikan	Dokumen	0	-	-	-	1	-	1
Jumlah dokumen perencanaan penanganan perumahan & permukiman	Dokumen	0	-	-	-	-	1	1
Jumlah dokumen perencanaan penanganan perparkiran	Dokumen	0	-	-	-	-	1	1
Jumlah dokumen perencanaan air minum, drainase dan sanitasi	Dokumen	0	1	-	1	-	-	2

**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas aparatur							
	a Waktu tindak lanjut	Menit	30	25	20	15	10	10
	b Pertumbuhan layanan sarana prasarana kantor	%	100	100	100	100	100	100
	c Peralatan kantor yang terpelihara	%	100	100	100	100	100	100
	d Persentase aparat yang telah mengikuti pelatihan	%	20	25	35	45	50	50
	e Penyerapan anggaran	%	92	93	94	95	96	96
	f Persentase usulan masyarakat dan Kab/Kota yang diakomodir dalam rencana pembangunan	%	91	92	93	94	95	95
	g Penyelesaian dokumen/laporan :							
	- DPA SKPD	Bulan	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov	Nov
	- LAKIP		Jan	Jan	Jan	Jan	Jan	Jan
2	Tersedianya data dan informasi yang akurat, mutakhir dan akuntabel							
	a Penanganan data spasial daerah	%	100	100	100	100	100	100
	b Masyarakat yang mengakses layanan NTB online (RKPD Online, NTB Satu Data)	Orang	10	20	40	80	160	160
	c Data pembangunan daerah yang diselaraskan	Data	11	5	11	5	11	11
3	Berdayagunanya hasil monitoring dan evaluasi pembangunan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	a Dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan yang berprestasi ditingkat nasional	Dokumen	3	4	4	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b Ketepatan penyelesaian dokumen/laporan : - KUA/PPAS - LKPJ c Persentase hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan	Bulan	Jun Mar	Jun Mar	Jun Mar	Jun Mar	Jun Mar	Jun Mar
		%	90	90	90	90	90	90
4	Meningkatnya kualitas rencana pembangunan daerah yang sinergis dan berbasis tata ruang							
	a Persentase pemanfaatan SDA potensial daerah	%	100	100	100	100	100	100
	b Persentase pengembangan industri daerah	%	70	75	80	85	90	90
	c Persentase peningkatan layanan pemerintah yang bersih	%	85	86	87	88	90	90
	d Persentase penyediaan kebutuhan sosial dasar	%	80	85	90	95	100	100
	e Persentase kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah	%	65	70	75	80	85	85
	f Persentase sinergitas pemanfaatan tata ruang wilayah	%	18.75	43.75	68.75	87.5	100	100
	g Persentase penanggulangan korban bencana	%	100	100	100	100	100	100